

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerjasama antar dua negara dalam hubungan internasional merupakan konsekuensi hubungan yang saling memberikan keuntungan antar dua negara. Hal itu didasarkan pada perspektif kerjasama, terutama dalam kerjasama ekonomi. Dengan kata lain, keterbatasan yang dimiliki setiap negara, mendorong negara untuk membangun kerjasama untuk memenuhi kepentingan, terutama kepentingan ekonomi.

Kerjasama yang dibangun dalam kerangka ekonomi, terutama ekonomi politik internasional, salah satunya mencakup kerjasama perdagangan yang dituangkan ke dalam kerjasama ekspor-impor. Dengan kata lain, ekspor-impor menjadi sebuah interaksi ekonomi yang mendorong negara dalam memenuhi kepentingan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kepentingan nasional, negara memerlukan kapabilitas dalam interaksi dengan negara lain. Kapabilitas atau kemampuan negara akan menentukan keberhasilan dalam mencapai kepentingan ekonomi.

Kemampuan negara untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional mengasumsikan kepentingan yang menentukan, menentukan keberhasilan atau kegagalan negara dalam konteks kegiatan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, tidak ada negara modern di dunia yang dapat hidup secara terpisah, terpisah dari pemain lain di panggung dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan berbagai interaksi ekonomi, seperti ekspor-impor dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena itu, Indonesia, seperti halnya negara lain, memerlukan pihak lain dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya pertanian yang cukup besar sehingga peluang ekspor Indonesia ke negara lain sangat besar.

Indonesia merupakan negara yang juga mengandalkan sektor ekspor untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam berbagai produk yang diekspor, salah satunya ekspor unggulan Indonesia adalah ekspor kopi. Salah satu negara yang menerima ekspor kopi instan terbesar Indonesia adalah Filipina. Filipina menjadi negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia, yaitu sebesar 30% dari total ekspor kopi Indonesia dengan nilai US\$ 421 juta. Ekspor kopi ke Filipina didominasi oleh Kopi Instan sebesar 99,7% (Kementerian Perdagangan, 2018). Dengan kata lain, Filipina menjadi negara yang memiliki nilai strategis dalam ekspor kopi Indonesia selama ini. Namun, sebagai negara pengimpor, Filipina memiliki standar produk impor yang justru merugikan Indonesia. Hal itu disebabkan karena Filipina menggunakan mekanisme *Special Safeguard*.

Special Safeguards sendiri bisa diartikan sebagai pembatasan impor atau pengenaan tarif tambahan, atau bisa juga diterapkan keduanya sekaligus (CNN Indonesia, 2018). Indonesia dan Filipina merupakan dua negara bertetangga yang banyak melakukan interaksi kerjasama, salah satunya kerjasama ekspor-impor kopi.

Ekonom juga mengembangkan model yang dimaksudkan untuk melakukan analisis biaya-manfaat dari berbagai instrumen diplomasi ekonomi melalui analisis statistik dari set data. Studi awal tentang hubungan konflik perdagangan berfokus pada efek peningkatan kesejahteraan perdagangan internasional (Heijman, 2011: 11). Dengan kata lain, hubungan konflik akan memebrikan dampak negatif terhadap kepentingan ekonomi sebuah negara.

Hubungan konflik yang dimaksud, salah satunya, terkait dengan persoalan hambatan yang diatur dalam mekanisme WTO, yaitu SSG. Persoalan ini yang dihadapi Indonesia terhadap Filipina, dalam persoalan hambatan ekspor kopi instan Indonesia ke Filipina.

Dalam perjalanannya, terdapat persoalan hambatan ekspor kopi Indonesia yang dilakukan Filipina terhadap Indonesia. Filipina merupakan negara dengan nilai ekspor Indonesia yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, ekspor produk kopi instan ke Filipina berkisar US\$300 juta—

US\$400 juta per tahun. Negara tersebut merupakan salah satu tujuan ekspor kopi olahan utama RI (Andri, 2019).

Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2018, Filipina telah melakukan penghambatan ekspor produk kopi kemasan Indonesia. Hambatan mereka lakukan dengan menerapkan tindakan pengamanan perdagangan atau *safeguards measures* sebesar 10-11 persen atas produk kopi kemasan (CNN Indonesia, 2018).

Secara resmi, Filipina telah memberlakukan *Special Agricultural Safeguard (SSG)* untuk produk kopi instan Indonesia sejak Agustus 2018 dengan bea *safeguard* berkisar antara 10-18% (Pablo, 2019). Pemberlakuan tersebut menjadi persoalan bagi Indonesia, terutama dalam pasar ekspor Indonesia.

Pemerintah Filipina telah menerapkan *Special Safeguards (SSG)* duty atas produk kopi instan 3-in-1 asal Indonesia. SSG merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang diatur oleh organisasi dagang dunia atau WTO berupa pengenaan tarif bea masuk tambahan produk impor yang dianggap memonopoli atau menguasai pasar dalam negeri sehingga merugikan petani negara pengimpor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor produk yang tengah dikenakan kebijakan pengamanan oleh pemerintah Filipina ini berkisar antara US\$ 350 - 400 juta per tahun, dan ditambah dengan pendapat lainnya yang dapat mencapai US\$ 600 juta (Nasrulkhan, 2018). Dengan nilai yang besar tersebut, maka kerugian sektor ekspor kopi instan Indonesia juga akan menjadi besar.

Filipina sendiri menetapkan SSG karena merasakan ketidakadilan terhadap produk ekspor kopi instan Indonesia. Negara tersebut beranggapan bahwa perusahaan asing hanya mau mengekspor kopi kemasan ke negaranya tanpa mau berinvestasi.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa persoalan ini tentu saja menyangkut kepentingan nasional, yaitu menjaga neraca perdagangan nasional yang kemungkinan berdampak pada, tidak hanya

hubungan antara Indonesia-Filipina, juga berpengaruh pada perekonomian nasional (Mualim, 2019).

Sebelum adanya hambatan SSG dari Filipina, di tahun-tahun sebelumnya, ekspor kopi olahan tercatat USD 356,79 juta alias meningkat 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi instan, ekstrak, dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lainnya.

Data yang diperoleh CNBC Indonesia dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag menunjukkan, nilai ekspor kopi instan (HS 21011110) RI ke Filipina dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan sebagai berikut: (Pablo, 2019).

1. 2014 US\$ 199,2 juta
2. 2015 US\$ 227 juta
3. 2016 US\$ 289,1 juta
4. 2017 US\$ 325 juta
5. 2018 US\$ 367,4 juta

Pertumbuhan ekspor kopi instan di 2018 sendiri tercatat 13,05% dengan produk ini menyumbang 5,38% dari seluruh ekspor RI ke Filipina. Adapun ekspor kopi ke sana secara keseluruhan tumbuh 26% di tahun sebelumnya. Namun, sejak Filipina menetapkan special safeguard atas impor kopi instan di Agustus sampai dengan September 2018, ekspor terhenti (Pablo, 2019).

Dengan kata lain, nilai US\$ 367, 4 juta tersebut dicapai Indonesia di Januari sampai dengan Juli 2018. Namun, sejak Agustus 2018 atau dimulainya SSG oleh pemerintah Filipina, praktis tidak terdapat nilai ekspor kopi karena aktifitas ekspor telah berhenti (Pablo, 2019).

Wakil Menteri Pertanian Filipina Segfredo Serrano mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menawarkan rencana investasinya di sektor tersebut sebagai bagian dari lobi-lobi agar hambatan dagang terhadap ekspor kopi kemasan dicabut. Namun, Pemerintah Filipina tidak menerima penawaran Indonesia tersebut (Andri, 2019).

Dengan adanya SSG sebagai mekanisme hambatan, kegiatan ekspor kopi instan Indonesia menjadi terhambat. Kegiatan ekspor tersebut dihentikan mengingat peningkatan bea masuk akan memberikan kerugian jika ekspor kopi instan tetap dijalankan oleh Indonesia.

Salah satu perusahaan yang mengalami dampak SSG adalah Mayora. Sebelum adanya SSG, industri kopi nasional memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dengan nilai ekspor mencapai 469,4 juta dollar pada tahun 2017 (Pitoko, 2018).

Direktur Utama Mayora Andre Sukendra Atmadja menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia mampu meningkatkan upaya lobi-lobinya kepada Filipina. Pasalnya, sejak dikenai SSG tahun lalu, ekspor kopi kemasan Mayora terganggu. Tahun sebelumnya, Mayora merugi US\$16 juta akibat kebijakan SSG Filipina. Terlebih, ekspor ke Filipina memiliki porsi 25%—30% terhadap total ekspor produk perseroan (Andri, 2019).

Persoalan yang berkembang antara Indonesia-Filipina menjadi persoalan perekonomian Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah dalam menyelesaikan persoalan perdagangan tersebut. Dalam hubungan antar negara, berbagai kegiatan ekonomi, baik perdagangan, maupun yang lebih spesifik, yaitu persoalan ekspor-impor, menjadi bagian atau tugas negara dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui langkah diplomasi.

Diplomasi dalam bidang ekonomi atau yang lebih dikenal sebagai diplomasi ekonomi menjadi langkah pemerintah atau negara dalam membangun hubungan ekonomi atau menyelesaikan persoalan ekonomi yang berkembang antara dua negara atau lebih.

Hal ini disebabkan karena perkembangan dinamis dari ekonomi global secara langsung mempengaruhi bentuk, metode, alat dan prinsip-prinsip diplomasi ekonomi, prinsip-prinsip diplomasi ekonomi meningkatkan lingkaran pengaruh dan membuat negara lain terlibat dalam diplomasi.

Tidak hanya alat dan kebijakan yang dirancang, tetapi juga teknik modern yang digunakan dalam diplomasi ekonomi telah banyak berubah. Lebih sering

mereka digunakan dan dibentuk selama negosiasi bilateral dan multilateral (Calestous, 2013).

Langkah diplomasi ekonomi Indonesia mulai menemukan titik terang. Pemerintah Filipina sepakat meninjau ulang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP/safeguard) terhadap ekspor kopi instan asal Indonesia (Pablo, 2019).

Peninjauan ulang tersebut tidak terlepas dari pertemuan koordinasi dagang Indonesia – Filipina yang menjelaskan langkah negosiasi Indonesia. Hasil negosiasi tersebut adalah berupa fasilitasi masuknya komoditas pertanian dari Filipina berupa buah pisang, nanas maupun bawang merah agar dapat masuk ke Indonesia, terutama melalui pelabuhan Bitung (Nasrullah, 2019).

Diplomasi ekonomi Indonesia mulai memberikan jalan keluar dalam memulihkan ekspor kopi Indonesia. Melalui langkah diplomasi ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai bentuk negosiasi dan kesepakatan untuk memulihkan hubungan ekspor-import Indonesia-Filipina. Hasil diplomasi ekonomi tersebut tentu saja menggambarkan keberhasilan diplomasi Indonesia.

Selain itu, hasil diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan pasar ekspor kopi Indonesia berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dalam mengamankan kepentingan ekonomi di bidang ekspor kopi Indonesia. Dengan begitu, aktivitas pengelolaan ekonomi Indonesia di luar negara atau dalam pasar internasional menjadi aman sekaligus tetap menjadi andalan ekspor bagi Indonesia

Fokus periode penelitian akan dibatasi pada Agustus 2018 sebagai awal dimulainya hambatan SSG oleh pemerintah Filipina dan berakhir pada Desember 2018 ketika diplomasi ekonomi Indonesia mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Filipina dalam penyelesaian hambatan ekspor kopi instan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya pertanian berupa kopi dengan nilai ekspor yang besar. Ekspor kopi menjadi salah satu agenda kebijakan ekonomi yang menopang perekonomian nasional. Di sisi lain, Filipina merupakan negara tujuan ekspor kopi terbesar bagi Indonesia. Untuk itu, pembahasan

mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Filipina menjadi subjek pembahasan yang menarik untuk dianalisa.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, hal menarik bagi yang dapat penulis garis bawahi adalah diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Filipina memberikan dampak positif dalam menghilangkan hambatan ekspor kopi Indonesia.

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat penulis identifikasi masalah yang terkait, yaitu:

Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap peninjauan ulang SSG yang diterapkan Filipina pada produk kopi instan Indonesia di tahun 2018?

Batas yang penulis tetapkan untuk penelitian ini periode 2018 sebagai periode awal dan akhir penelitian mengingat periode tersebut dimulainya hambatan dan di periode itu pula berakhir hambatan ekspor setelah Indonesia melakukan diplomasi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa serta memahami langkah diplomasi ekonomi Indonesia dalam peninjauan ulang SSG ekspor kopi Indonesia ke Filipina

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis** dari penelitian ini adalah untuk menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah Indonesia dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatan diplomasi ekonomi.
- b. Manfaat praktis** dari penelitian ini adalah memberi gambaran tentang persoalan ekspor kopi dan SSG antara Indonesia dan Filipina.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan penjelasan agar memperoleh pemahaman yang runut dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan penelitian. Bab ini menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang penulis gunakan dalam membuat penelitian, kerangka pemikiran yang mencakup teori dan konsep yang penulis gunakan untuk mengarahkan alur pemikiran dan asumsi penelitian agar mengarah kepada terjawabnya topik permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas konsep dan teknik penelitian yang peneliti gunakan, guna memaksimalkan pencapaian hasil akhir penelitian. Teknik ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENYIKAPI PENERAPAN TARIF OLEH FILIPINA PADA PRODUK KOPI INSTAN

Pada bab ini penulis berusaha memberi penjelasan yang akan menjawab pertanyaan dari masalah yang telah dirumuskan. Penulis akan fokus kepada pembahasan yang menghubungkan permasalahan dengan kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

BAB V MASUKNYA KOMODITAS PERTANIAN FILIPINA KE INDONESIA

Bab ini menekankan pada konsekuensi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Filipina yang tertuang dalam kesepakatan kedua negara untuk membuka ruang ekspor Filipina ke pasar domestik Indonesia, yaitu produk-produk pertanian Filipina, seperti pisang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat inti dari hasil penelitian yang digambarkan secara lebih ringkas dan diharapkan mampu menjelaskan segala cakupan konten di dalam penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga terdapat saran dan harapan dari penulis terkait diplomasi ekonomi sebuah negara terhadap negara lain dalam penyelesaian hambatan ekspor dalam kerjasama ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisikan sumber-sumber referensi dari penelitian yang penulis lakukan.